

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan, baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. kinerja keuangan dipakai manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan dari kinerja keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu dan digunakan untuk memprediksi keuangan dimasa yang akan datang (Soelistyoningrum, 2010). Menurut Fahmi (2010:142) definisi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

“kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”

Penilaian kinerja suatu perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Menurut Fahmi (2011:3) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

1. “Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan  
Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan  
Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang diperoleh  
Dari hasil perhitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu:
  - a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
  - b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan  
Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai masalah yang ditemukan  
Pada tahap ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi huna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.”

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan yang akan diukur dengan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui analisis rasio-rasio keuangan suatu perusahaan.

### 2.1.1.1 Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan 2 (dua) variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan

Menurut Irawati (2006:22) mengatakan bahwa:

“Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan 2 buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun rugi-laba.”

Menurut Fahmi (2011:44) menyatakan bahwa:

“Rasio keuangan atau *financial ratio* sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai. Informasi tersebut dapat diketahui melalui cara yang sederhana yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.”

Menurut Sudana (2011:20) menyatakan bahwa:

“Rasio keuangan didesain untuk memperlihatkan hubungan antar-kun pada laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi).”

Rasio-rasio keuangan dihitung berdasarkan pada angka-angka dari:

1. Neraca
2. Laporan Rugi-Laba
3. Neraca dan Laporan Rugi-Laba

Dua laporan keuangan yang utama yang digunakan dalam melakukan interpretasi laporan keuangan yaitu laporan neraca dan rugi laba. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Di dalam neraca akan terlihat kekayaan perusahaan yang berupa aktiva lancar dan aktiva tetap, yang sumber pendanaannya baik yang berasal dari pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang dan modal sendiri. Sedangkan laporan rugi laba merupakan laporan keuangan yang menunjukkan hasil kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada laporan rugi laba akan tampak pendapatan, biaya, dan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.

#### **2.1.1.2 Analisis Rasio Keuangan**

Pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Kondisi suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Melalui analisis terhadap laporan keuangan, akan dapat diketahui posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang bersangkutan, dimana hasil dari analisis tersebut pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan.

Secara jangka panjang rasio keuangan juga dipakai dan dijadikan acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu perusahaan. Menurut Wasidi dan Bambang dalam Irham Fahmi (2010:172):

“Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan *tren* pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut Sudana (2011:20) menyatakan bahwa:

“Analisis rasio keuangan merupakan salah satu cara memperoleh informasi yang bermanfaat dari laporan keuangan perusahaan.”

Dari pendapat di atas dapat dimengerti bahwa rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat. Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai kegunaannya masing-masing. Jadi untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio yang merupakan perbandingan angka-angka yang terdapat pada pos-pos laporan keuangan.

### **2.1.1.3 Manfaat Analisis Rasio Keuangan**

Analisis rasio perusahaan merupakan langkah awal dalam analisi keuangan, karena sebagaimana fungsinya rasio keuangan yang dirancang dapat digunakan untuk member gambaran hubungan perkiraan-perkiraan laporan keuangan. Manfaat dari analisis rasio keuangan dapat ditinjau dari dua sudut (Irawati, 2006:24), yaitu:

1. “Pihak Intern (Manajemen)  
 Dalam sudut pandang pihak intern perusahaan atau manajemen, analisis laporan keuangan berguna sebagai cara untuk:
  - a. Mengantisipasi keadaan di masa mendatang, dan
  - b. Sebagai titik tolak bagi tindakan perencanaan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian di masa mendatang.
2. Pihak Ekstern (Investor)  
 Dalam sudut pandang pihak ekstern manfaat dari analisis rasio keuangan yaitu untuk meramalkan masa depan perusahaan, atau dengan kata lain dari sudut pandang pihak ekstern manfaat analisis rasio keuangan yaitu untuk menentukan prediksi apakah perusahaan tersebut bisa berkembang dalam arti dapat melakukan operasionalnya kembali atau malah perusahaan tersebut gulung tikar, sehingga akan mempengaruhi keberadaan pihak ekstern di dalam perusahaan tersebut.”

#### **2.1.1.4 Jenis-jenis Rasio Keuangan**

Karena perbedaan tujuan dan harapan yang ingin dicapai, maka analisis keuangan juga beragam. Tidak ada satu analisis rasio yang dapat menjawab semua kepentingan *supplier*, *shareholder*, kreditor ataupun manajemen yang memperhatikan semua aspek analisis keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian untuk menjawabnya dikembangkan empat kelompok rasio keuangan.

Menurut Sartono (2010:114) empat kelompok rasio keuangan:

- a. “Rasio likuiditas, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.
- b. Rasio aktivitas, menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan assets untuk memperoleh penjualan.
- c. Financial leverage ratio, menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Rasio profitabilitas, dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri.”

## 2.1.2 Profitabilitas

### 2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Sartono (2010:122), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets maupun laba bagi modal sendiri”.

Menurut Sudana (2011:22) mengatakan bahwa:

“*Porfitability ratio* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”

Menurut Kasmir (2013:114) mengatakan bahwa:

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Fahmi (2010:184) mengatakan bahwa:

“Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”

Sehingga berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

### **2.1.2.2 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas**

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:197):

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.”

### **2.1.2.3 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012:198) adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Manfaat lainnya.”

#### 2.1.2.4 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Ada beberapa rumus yang biasa dipergunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on investment* atau *return on assets* dan *return on equity*. Penjelasan dari beberapa rumus yang biasa dipergunakan untuk mengukur rasio profitabilitas (Martono dan Harjito, 2010:59), sebagai berikut:

1. *Gross Profit Margin*  
Merupakan perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin*  
Margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Return On Investment* atau *Return On Assets*  
Rasio ROI atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva (*assets*) yang dipergunakan (Sartono, 2010).

$$\text{Return on Investment (ROI)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### 4. *Return On Equity*

*Return on Equity* (ROE) atau sering disebut *Rentabilitas Modal Sendiri* dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Modal Sendiri}}$$

### 2.1.3 *Leverage*

#### 2.1.3.1 *Pengertian Leverage*

Menurut Fahmi (2010:179) mengatakan bahwa:

“Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.”

Menurut Kasmir (2012:151) mengatakan bahwa:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang.”

Menurut Tampubolon (2005: 37) mengatakan bahwa:

“Rasio Leverage digunakan untuk menjelaskan penggunaan utang untuk membiayai sebagian daripada aktiva korporasi. Pembiayaan dengan utang mempunyai pengaruh bagi korporasi karena utang mempunyai beban yang bersifat tetap.”

Menurut Sartono (2010:120) mengatakan bahwa:

“*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%.”

Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas atau *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang bila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

### **2.1.3.2 Tujuan Penggunaan Rasio *Leverage***

Berikut ini ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2012:153), yakni:

1. “untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. tujuan lainnya.”

### 2.1.3.3 Manfaat Penggunaan Rasio *Leverage*

Manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* menurut Kasmir (2012:154) adalah:

1. “untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. manfaat lainnya.”

### 2.1.3.4 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Ada beberapa rumus yang biasa dipergunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio*, *Time Interest Earned Ratio*, *Fixed Charge Coverage*. Penjelasan dari rasio tersebut menurut Fahmi (2010:155):

1. “*Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*  
Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau sebagian besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Total Assets}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio*:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Modal}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

4. *Time Interest Earned Ratio*

Menurut J. Fred Weston *Time Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*. Jumlah kali perolehan bunga atau *time interest earned* merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Secara umum semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Rumus untuk menghitung *time interest earned ratio*:

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

### 5. *Fixed Charge Coverage*

*Fixed charge coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rumus untuk menghitung *fixed charge coverage* adalah:

$$\text{Fixed Charge Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}{\text{Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/Lease}}$$

## 2.1.4 Ukuran Perusahaan

### 2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Fery dan Jones dalam Widiyanto (2011) mengenai ukuran perusahaan menyatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva.”

Menurut Mahfoedz (1994) dalam Utammy (2013) mengenai ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan.”

Menurut Hart dan Oulto (1996) dalam Inshani (2012) mengatakan bahwa:

“Ukuran perusahaan merupakan salah satu alat untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Karyawan, aktiva, penjualan, *market value*, dan *value added* adalah beberapa ukuran umum untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan.”

Ronald Clapham (1996) dalam Inshani (2012), ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah:

1. “Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.
3. Total hutang ditambah dengan nilai pasar saham biasa perusahaan yang merupakan jumlah hutang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada saat atau suatu tanggal tertentu.
4. Total aktiva (*assets*), yang merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.”

#### **2.1.4.2 Pengukuran Ukuran Perusahaan**

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) dalam Kusnia (2013) mengemukakan bahwa:

“Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang diatur dalam ketentuan Bapepam No. 11/PM/1997, menyatakan bahwa:

“Perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan modal (*total asset*) tidak lebih dari 100 milyar Rupiah.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki aset lebih dari 100 milyar Rupiah ke atas dikelompokkan ke dalam industri menengah dan besar. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus *asset* karena nilai dari *asset* tersebut yang sangat besar dibanding variabel keuangan lainnya.

#### 2.1.4.3 Pengelompokkan Ukuran Perusahaan

Pembagian ukuran perusahaan berdasarkan skalanya seperti yang dikelompokkan oleh Biro Pusat Statistik 1999 dalam Inshani (2012) sebagai berikut:

Skala Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Industri Rumah Tangga	1-4 orang
Industri Kecil	6-19 orang
Industri Menengah	20-99 orang
Industri Besar	100 orang keatas

Menurut Small Business Organization (2000), klasifikasi ukuran perusahaan berdasarkan jumlah karyawan sebagai berikut:

Skala Perusahaan	Jumlah Karyawan
Perusahaan Kecil	0-500 karyawan

Perusahaan Sedang	500-999 karyawan
Perusahaan Besar	>1000 karyawan

Sedangkan pengelompokan atas dasar tingkat penjualan adalah sebagai berikut:

Skala Perusahaan	Tingkat Penjualan
Perusahaan Besar	>Rp 10 Milyar
Perusahaan Sedang	Rp 3-10 Milyar
Perusahaan Kecil	<Rp 3 Milyar

Pengelompokan ukuran perusahaan atas dasar total asset dan tingkat penjualan menurut UU No. 20 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah sebagai berikut:

Skala Perusahaan	Total Assets	Tingkat Penjualan/tahun
Perusahaan Besar	>Rp 10 Milyar	>Rp 50 Milyar
Perusahaan Menengah	>Rp 500 Juta-Rp10 Milyar	>Rp 2,5 Milyar-Rp 50 Milyar
Perusahaan Kecil	>Rp 50 Juta-Rp 500 Juta	>Rp 300 Juta-Rp 2,5Milyar
Perusahaan Mikro	Rp 50 Juta	Rp 300 Juta

Menurut Widiyanto (2011) ukuran perusahaan dapat diukur dengan log of total assets. Log of total assets ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Size = \text{Log of Total asset}$$

### **2.1.5 Corporate Governance**

#### **2.1.5.1 Pengertian Corporate Governance**

Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya dan kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Forum for Corporate Governance in Indonesia-FCGI (2006) mengambil definisi *Corporate Governance* dari *Cadbury Committee of United Kingdom* dalam Soekrisno Agoes (2013:101) yang apabila diterjemahkan adalah:

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Menurut Jill Solomon dan Aris Solomon dalam Sutojo dan Aldridge (2005:4), menyatakan bahwa:

“*Corporate governance* adalah sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh Board of Directors) dengan pemegang saham. *Corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban

atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota stakeholders non-pemegang saham.”

FCGI (Forum *Corporate Governance* Indonesia) (Gideon, 2005) dalam Rahmawati (2012: 169) mendefinisikan *corporate governance*:

“*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan intern atau ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Said *et. al.* dalam Ratnasari (2011) *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*.

### **2.1.5.2 Proses *Corporate Governance***

Proses *corporate governance* terdiri dari berbagai fungsi yang dimaksudkan agar *corporate governance* tercapai. Terdapat lima fungsi pokok *corporate governance* menurut Warsono dkk (2009:58), yaitu:

1. “*Oversight* (perhatian secara bertanggung jawab); fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas;
2. *Enforcement* (penegakan); fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar;
3. *Advisory* (pemberian saran); fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG dilakukan berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen;
4. *Assurance* (penjaminan); fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG dievaluasi dan diuji berdasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan;

5. *Monitoring* (pemantauan); fungsi ini dimaksudkan agar penerapan CG dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam operasi perusahaan.”

### 2.1.5.3 Struktur *Corporate Governance*

Struktur *corporate governance* diperlukan agar pelaksanaan *corporate governance* mudah untuk dilaksanakan. Ada dua pola struktur *corporate governance*:

1. *One Tier System*

*One Tire System* juga disebut sebagai sistem satu tingkat (*single board system*). Sistem ini digunakan oleh negara Anglo-Saxon seperti Amerika dan Inggris. Dalam sistem satu tingkat, peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah, yang disebut dengan *Board of Director*. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif.

2. *Two Tiers System*

*Two Tiers System* disebut juga Sistem Dua Tingkat yang berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan Direksi bertugas mengelola mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Belanda, Jerman dan Indonesia.

### 2.1.5.4 Prinsip *Corporate Governance*

Menteri Negara BUMN mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan GCG (Tjager dkk, 2003). Menurut keputusan ini ada lima prinsip penerapan GCG, yaitu:

1. “Perlakuan yang setara (*fairness*)  
Merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).
2. Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan)  
Artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.
3. Prinsip akuntabilitas  
Adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
4. Prinsip tanggung jawab (tanggung jawab)  
Adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan.
5. Kemandirian  
Artinya suatu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas, dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.”

### **2.1.5.5 Manfaat *Good Corporate Governance***

Penerapan konsep GCG merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* menurut FCGI (2001):

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.”
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *coporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.”

### **2.1.5.6 Tujuan *Good Corporate Governance***

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan manajerial, dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-11/M/-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4:

1. “Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.”

#### **2.1.6 Mekanisme *Corporate Governance***

Berbagai studi terkait *corporate governance* dan *firm value* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *shareholders*. Konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) dalam Hastuti (2005), yang menyatakan: “*Corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam.”

Menurut Walsh dan Schward (2009) dalam Idah (2013) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control*, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.

Menurut Agrawal dan Knoeber (1996) dalam Juwitasari (2008) menjelaskan bahwa pembagian mekanisme pengendali *corporate governance* menjadi dua, eksternal dan internal. Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional, *outside block holdings*, dan kegiatan *takeover*. Mekanisme pengendalian eksternal tidak hanya pasar modal saja, tetapi juga perbankan sebagai penyuntik dana, masyarakat sebagai konsumen, *supplier*, tenaga kerja, pemerintah sebagai regulator, serta *stakeholder* lainnya. Mekanisme pengendalian internal yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan tidak hanya dewan komisaris saja tetapi juga komite-komite dibawahnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pemegang saham internal, anggota dari dewan komisaris dan karakteristiknya seperti ukuran dewan komisaris, jumlah dari dewan komisaris yang independen (dari luar perusahaan), komite remunerasi, pembiayaan utang.

Menurut Jensen (2000), tujuan utama dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan peringatan awal, mengembangkan organisasi sebelum mencapai tingkat kritis. Menurut Lukviarman (2002), dewan komisaris dalam hal ini merupakan pihak sebagai penanggungjawab final dalam fungsi perusahaan. Sistem *corporate governance* sangat kompleks dan terintegrasi sehingga diperlukan suatu mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol pada *corporate governance* dirancang untuk mengurangi ketidakefisienan kinerja manajemen perusahaan yang timbul karena *moral hazard*, kesalahan dan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan mekanisme *corporate governance* internal yaitu proporsi dewan komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen dipilih karena menurut Wijayanti (2013) dewan komisaris dapat mengawasi kegiatan agen (manajemen) dan melindungi kepentingan prinsipal (pemegang saham). Uwuigbe (2011) dalam Sari (2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Menurut Ho dan Wong (2001) dalam Pramunia (2010), dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa komite audit membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan dewan komisaris. Dengan demikian, komite audit dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela.

#### **2.1.6.1 Dewan Komisaris Independen**

Dalam Pedoman umum *Good Corporate Governance* (2006:13) pengertian komisaris independen adalah:

“anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.”

Menurut Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) komisaris independen didefinisikan sebagai:

“seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Pengertian komisaris independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.”

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP -315/BEJ/06 – 2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP – 339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa: “setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.” Dewan yang terdiri dari dewan komisaris

independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam Praditia (2010), menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
5. Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
7. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Menurut Surya dan Yustivandana (2006) dalam Ratnasari (2011), komisaris independen bersama dewan komisaris memiliki tugas-tugas utama meliputi

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset. Tugas ini terkait dengan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen (*accountability*);

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan (*transparency*) dan adil (*fairness*);
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan asset dan manipulasi transaksi perusahaan. Tugas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham (*fairness*);
4. Memonitor pelaksanaan *governance*, dan melakukan perubahan jika diperlukan;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan untuk menyediakan tersedianya informasi yang tepat waktu dan jelas.

Menurut Sari (2013), proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

*Komisaris Independen*

$$= \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris yang ada}} \times 100\%$$

#### **2.1.6.2 Komite Audit**

Melalui Surat Edaran Bapepam No. 03/IPM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Komite ini harus secara independen dan professional memberikan pendapat kepada dewan komisaris, termasuk komisaris independen, dalam hal menilai dan

mengidentifikasi hal-hal yang menyangkut laporan keuangan dengan berbagai pertimbangan risiko yang ada. Menurut Haryani (2014), komite audit merupakan:

“Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Komite audit bertanggung jawab bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal), hal tersebut dapat mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2002) komite audit merupakan:

“Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.”

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.”

Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Effendi (2009:25), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut:

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan

memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

Daniri (2006) dalam Pohan (2008) yang dikutip oleh Annisa dan Kurniasih (2012), menyebutkan bahwa:

“Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.”

Komite audit merupakan hal yang wajib untuk dibentuk oleh perusahaan. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) bahwa:

“Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal.

Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.”

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Menurut Kilbers & Fogarty (dalam Sari, 2008) menyebutkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan komite audit dalam menjalankan tugasnya, hal-hal tersebut antara lain: 1) kewenangan formal dan tertulis; 2) kerjasama manajemen; dan 3) kualitas/kompetensi anggota komite audit. Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Menurut Azis (2014), ukuran komite audit dihitung dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan. Pengukuran komite audit dalam penelitian ini, yaitu dengan menghitung jumlah komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

## **2.1.7 Sustainability Report**

### **2.1.7.1 Definisi Keberlanjutan**

Menurut *Agricultural Economic Research Institut* (2004) dalam (Suryono, 2011) menyatakan bahwa konsep *sustainability* pada awalnya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen lebih banyak daripada kemampuan panen hutan pada kondisi normal. Kata *nachhaltigkeit* (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya melestarikan sumber daya alam untuk masa depan. Pengertian tersebut mengartikan bahwa *sustainability* lebih luas dari konteks lingkungan.

Menurut Akbar (2008) dalam Idah (2013), keberlanjutan perusahaan adalah suatu pendekatan bisnis dalam menciptakan nilai pemegang saham secara jangka panjang dengan menggunakan peluang-peluang yang ada dan mengelola risiko yang diukur dari segi ekonomi, lingkungan dan pembangunan sosial. Pemimpin perusahaan berkelanjutan meningkatkan nilai jangka panjang pemegang saham dengan cara menyusun strategi dan manajemen mereka untuk mengusahakan dengan terus menerus pasar potensial bagi keberlanjutan produk dan jasa sedangkan dalam waktu yang sama dengan sukses mengurangi biaya dan risiko berkelanjutan.

Menurut Daly dalam Suryono (2011) mengatakan *sustainability* merupakan suatu keadaan yang dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dari pernyataan ini diusulkan tiga kaidah operasional dalam mendefinisikan keadaan dari *sustainability*:

1. “Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam tersebut untuk diperbarui kembali;
2. Sumber daya alam yang tidak diperbarui seperti bahan bakar dari fosil dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya;
3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan memusnahkannya.”

### **2.1.7.2 Pembangunan Berkelanjutan**

Menurut Brundland Commission (WCED 1987) dalam Burhan (2009) menyatakan bahwa *sustainable development*:

*“Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”*

Menurut Wibisono (2007:13), pembangunan berkelanjutan adalah:

“Pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.”

Menurut Emil Salim dalam Idah (2013), pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang dilaksanakan saat ini jangan sampai merusak, mencemari, dan menghabiskan sumber daya alam yang ada serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut

Kementrian Lingkungan Hidup dalam Idah (2013), pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria, yaitu: (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of naturan resources*; (2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* atau *replaceable resource*. Emil Salim (2006) dalam Adhipradana (2014) menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

“Dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan harus menekankan pentingnya segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hubungan hukum ekonomi, alam-ekologi, dan peradaban.”

Tujuan dari *sustainable development* adalah menyeimbangkan antara dua kepentingan sekaligus, yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dua tujuan ini saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. *Sustainable development* tercapai ketika perusahaan telah berpijak dalam konsep *triple bottom line*.

### **2.1.7.3 Konsep *Triple Bottom Line***

Menurut Warsono dkk (2007:32), istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

### 1. *Profit*

Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan profit. Perusahaan dapat berkelanjutan jika mendapatkan *profit* secara terus menerus. Dengan *profit* yang didapatkan perusahaan, perusahaan dapat tetap *going concern*. Namun dalam kenyataannya, saat ini perusahaan tidak dapat *going concern* hanya dengan mengedepankan *profit* saja, namun juga *people* dan *planet* yang terlibat dalam proses dan dampak atas aktivitas perusahaan yang sering dilalaikan oleh perusahaan.

### 2. *People*

Perusahaan memerlukan *people* baik investor, karyawan, *supplier*, konsumen, masyarakat, maupun lembaga masyarakat. Perusahaan memerlukan investor untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Untuk menarik para investor, perusahaan harus dapat memenuhi keinginan investor dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi agar para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Karyawan sebagai pendukung proses produksi memerlukan perhatian perusahaan atas pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Karyawan memerlukan perhatian atas gaji, pelatihan, pendidikan dan jaminan-jaminan.

Mengelola hubungan yang baik dengan *supplier*, konsumen, dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan pencitraan baik bagi perusahaan. perusahaan yang memiliki hubungan yang baik dengan *supplier* dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan keterikatan sehingga dapat memperlancar proses pemesanan bahan baku dan pelunasan utang dagang. Hubungan yang baik perusahaan dengan konsumen serta kualitas produk yang baik dapat berdampak pada tingkat loyalitas konsumen terhadap produk-produk perusahaan. Semakin baik hubungan perusahaan dengan konsumen maka akan semakin loyal konsumen tersebut terhadap perusahaan karena merasa diperhatikan dan terlibat dalam kegiatan yang diadakan perusahaan. Perusahaan dan masyarakat sekitar harusnya dapat berhubungan baik. Kegiatan operasi perusahaan dengan pengelolaan yang tidak baik dapat mengganggu masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang terusik akan melakukan protes yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Dengan pencitraan baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang berlipat. Dengan perusahaan fokus terhadap lingkungan sekitar, berbagai lembaga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup akan mendukung kegiatan dan keberlangsungan perusahaan.

### 3. *Planet*

Perusahaan juga harus memperhatikan planet (lingkungan) karena perusahaan dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara serampangan dapat menyebabkan menipisnya SDA yang ada. Rusaknya lingkungan tidak hanya

disebabkan penggunaan SDA secara serampangan, namun juga karena tercemarnya lingkungan sebagai akibat dari kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengolah limbah dari kegiatan operasional perusahaan. Kerusakan lingkungan yang berimbas pada ketersediaan SDA sebagai bahan baku produk dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Perusahaan harus dapat menggunakan SDA dengan efisiensi yang memastikan ketersediaan SDA untuk generasi selanjutnya dan mengolah limbah dengan efektif agar lingkungan sekitar tidak tercemar.”

#### **2.1.7.4 Tanggung Jawab Sosial (CSR)**

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD)

mendefinisikan *corporate social responsibility* dalam Nor Hadi (2011:48) adalah:

“Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.”

Menurut Grey *et. al.* dalam Waryanto (2010), pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban perusahaan yang telah ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia, kegiatan CSR umumnya dilaporkan dalam laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan merupakan alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Menurut Darwin dalam Idah

(2013), saat ini telah berkembang pelaporan perusahaan mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berdiri sendiri dan terpisah dari laporan tahunan perusahaan, yang dikenal dengan *Sustainability Report*.

#### **2.1.7.5 Perbedaan *Sustainability Report* dan *Corporate Social Responsibility***

Menurut Aktas (2013) menyatakan bahwa:

“Although “Sustainability” and “Corporate Social Responsibility” (CSR) terms have often been used inter-changeably, they indicate different points. “Sustainability is more of an over-arching concept which seeks to promote continuous long term growth in all the various forms of capital available to us financial, natural and social. By contrast many see CSR as a more limited concept, focused on shorter-term issues and activities such as legal compliance, philanthropy and improvement in workforce conditions. In general it might be said all organizations aspire to being responsible but few would claim to be truly sustainable” (IFAC, 2006, p.1)”.

Menurut Burhan (2012), menyatakan bahwa:

“Sustainability reporting is closely related with corporate social responsibility reporting. It has a voluntary character. Social responsibility reporting refers to the measurement and communication of information about company’s effect on employee welfare, the local community, and the environment. Information on company welfare may involves working conditions, job security, equal opportunity, workforce diversity, and child labor. Environmental issues may include the impact of production process, products, and services on air, water, land, biodiversity, and human health (Choi, 2006, p. 158). However, corporate social responsibility reporting focuses only on environmental and social disclosure, while the concept of sustainable development tied in sustainability reporting involves broader area that covers environmental, social, and economic performances. As the campaign of sustainable development has been increase, many corporate non-financial reports, corporate social responsibility reports now have been repackaged as sustainability report (Lopez etal, 2007).

### 2.1.7.6 Definisi *Sustainability Report*

Menurut Effendi (2009:109), laporan keberlanjutan adalah:

“Laporan keberlanjutan (*sustainable report*) yaitu suatu laporan yang bersifat nonfinansial yang dapat dipakai sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan”.

Menurut Khomsiyah (2009:24) menyatakan bahwa:

“*Sustainability reporting* adalah laporan semua aspek yang mempengaruhi kelangsungan operasi perusahaan, yaitu aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang terjadi di perusahaan.”

Menurut GRI (2006), menyatakan bahwa:

“Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan keberlanjutan merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya *triple bottom line*, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya).”

Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi, baik kontribusi yang positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Pelaporan keberlanjutan merupakan proses yang membantu organisasi dalam menetapkan sasaran, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan terhadap ekonomi global berkelanjutan. Pelaporan keberlanjutan merupakan salah satu yang menggabungkan

profitabilitas jangka panjang dan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut GRI (2006), pelaporan keberlanjutan dapat menjadi platform untuk menyampaikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola organisasi, yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Aspek yang dianggap penting oleh organisasi, terkait dengan harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan, mendukung pelaporan keberlanjutan. Pemangku kepentingan dapat mencakup mereka yang berinvestasi pada organisasi serta mereka yang memiliki hubungan lain dengan organisasi. Pelaporan keberlanjutan membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan.

#### **2.1.7.7 Pengungkapan *Sustainability Report***

Menurut Adhipradana (2014), mengemukakan bahwa:

“Pengungkapan informasi sosial perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan *sustainability report*.”

Dimana masih belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara Eropa, dimana praktik pengungkapan *sustainability report* telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 1998) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*),

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan PSAK No. 1 (revisi 1998) tersebut, maka perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

*Global Reporting Initiative* (GRI) dalam Effendi (2009), suatu organisasi yang memiliki misi merancang, mengembangkan, dan menyebarkan program *Sustainability Report*. *Global Reporting Initiative and Value Reporting* telah mengeluarkan pedoman yang disebut *Sustainable Reporting Guidelines*. Berkembangnya *sustainability report* merupakan bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) diungkapkan sebagai pelengkap laporan keuangan (*financial statement*), jadi laporan ini terpisah dari laporan keuangan perusahaan.

Menurut Sari (2013), untuk mendukung adanya pembangunan berkelanjutan, *sustainability report* digunakan sebagai salah satu media informasi perusahaan kepada *stakeholder* internal maupun eksternal untuk menilai apakah manajemen suatu

perusahaan menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Jadi, adanya *sustainability report* sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri.

#### **2.1.7.8 Prinsip Pengungkapan *Sustainability Report***

*Sustainability report* digunakan untuk menggambarkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan *sustainability report* disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh GRI. Penggunaan prinsip tersebut dapat menghasilkan informasi yang terdapat di dalam *sustainability report* lebih berkualitas dan memadai untuk membantu para *stakeholder* dalam menilai perusahaan. Adapun prinsip-prinsip menurut GRI (2006) adalah sebagai berikut:

1. “Keseimbangan  
*Sustainability report* sebaiknya mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja.
2. Dapat Diperbandingkan  
*Sustainability report* berisi isu-isu dan informasi yang ada sebaiknya dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi tersebut harus disajikan dengan seksama sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.
3. Kecermatan  
Informasi yang dilaporkan dalam *sustainability report* harus cukup akurat dan rinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.
4. Ketepatan Waktu  
Pelaporan *sustainability report* tersebut harus terjadwal serta informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para *stakeholder* ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan.
5. Kesesuaian

Informasi yang diberikan dalam *sustainability report* harus sesuai dengan pedoman dan dapat dimengerti serta dapat diakses oleh *stakeholder*. *Stakeholder* harus dapat menemukan informasi yang diperlukan dengan mudah.

6. Dapat Dipertanggungjawabkan

Informasi dan proses yang digunakan dalam penyusunan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dengan tepat sehingga dapat menetapkan kualitas dan materialitas informasi dari *sustainability report*.”

### 2.1.7.9 Standar Pengungkapan *Sustainability Report*

Standar pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keberlanjutan (GRI, 2006):

1. “Strategi dan Profil: Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks untuk dapat memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, profil, dan tata kelola.
2. Pendekatan Manajemen: Pengungkapan yang mencakup mengenai bagaimana sebuah organisasi menggunakan topik tertentu untuk memberikan konteks dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu.
3. Indikator Kinerja: Indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.”

### 2.1.7.10 Manfaat *Sustainability Report*

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Adhipradana (2014) manfaat yang didapat dari *sustainability report* adalah:

1. “*Sustainability report* memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.

5. *Sustainability report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.
7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.”

#### **2.1.7.11 Tujuan Pembuatan *Sustainability Report***

Menurut Jalal (2010) dalam Idah (2013), pembuatan dan penyebaran *sustainability report* (Laporan Keberlanjutan) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. “Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.
2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, *stakeholder convening*, dan sebagainya).
3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah.
4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.”

#### **2.1.7.12 Indikator *Sustainability Report***

Menurut Khomsiyah (2009:25), *sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut. Terdapat tiga indikator dalam *sustainability report* yaitu, indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial. Indikator ekonomi menunjukkan dampak ekonomi secara langsung dari aspek pelanggan, pemasok, karyawan, sektor publik, dan penyedia dan atau investor.

Indikator lingkungan meliputi energy, air, emisi, limbah, keanekaragaman hayati, produk dan jasa, ketaatan terhadap peraturan, transportasi, dan lingkungan secara keseluruhan.

Indikator sosial merupakan indikator yang paling luas yang meliputi empat aspek, yaitu ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab terhadap produk. Aspek ketenagakerjaan meliputi hubungan perusahaan dengan tenaga kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, penyebaran dan kesempatan tenaga kerja. Aspek hak asasi manusia meliputi tidak adanya diskriminasi, kebebasan karyawan dalam membentuk serikat peerja, tenaga kerja anak-anak, dan penegakan disiplin. Aspek masyarakat meliputi pengembangan masyarakat, suap dan korupsi, pengaruh politik pada perusahaan, persaingan dan penentuan harga. Aspek tanggung jawab terhadap produk meliputi keselamatan dan kesehatan konsumen, produk dan jasa iklan, penghormatan terhadap privasi pelanggan.

### **2.1.8 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan, ukuran perusahaan, *corporate governance*, dan pengungkapan *sustainability report*. Penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda dan penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Hari Suryono dan Andri Prastiwi (2011)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> (CG) terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (SR) (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang <i>Listed (Go-Public)</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009)	Terdapat pengaruh positif signifikan yang ditimbulkan oleh variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan variabel seperti likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas, dan <i>governance committee</i> tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> suatu perusahaan.
2.	Hari Suryono Widiyanto (2011)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang <i>Listed (Go-Public)</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009)	Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan profitabilitas dan praktik <i>corporate governance</i> (komite audit dan dewan direksi) dinyatakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pembuatan <i>sustainability report</i> . Pada variabel-variabel karakteristik perusahaan (likuiditas dan aktivitas) dan praktik <i>corporate governance (committee governance)</i> menunjukkan tidak adanya pengaruh yang ditimbulkan terhadap pembuatan <i>sustainability report</i> . Sedangkan pada variabel <i>leverage</i> , menunjukkan tidak adanya pengaruh <i>leverage</i> dalam pengungkapan <i>sustainability report</i> suatu perusahaan.
3.	Yunita Ratnasari (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Dalam <i>Sustainability Report</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat, dan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan

			<i>sustainability report</i> . Variabel kontrol terdiri dari <i>size</i> , profitabilitas, dan <i>leverage</i> . Hanya <i>leverage</i> yang memiliki pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i> .
4.	Adistira Sri Aulia (2013)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Praktek Pengungkapan <i>Sustainabilit Reporting</i> dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia	Variabel <i>size</i> dan <i>type</i> memiliki pengaruh terhadap <i>sustainability reporting disclosure</i> . Sedangkan variabel profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>sustainability reporting disclosure</i> .
5.	Chintya Dwi Putri (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Peusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011)	Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam <i>sustainability report</i> . Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif, sedangkan umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam <i>sustainability report</i> .
6.	Idah (2013)	<i>Corporate Governance</i> dan Karakteristik Perusahaan dalam Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel dewan direksi, <i>governance committee</i> , profitabilitas dan ukuran perusahaan berperan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> , sedangkan variabel dewan komisaris, komite audit, likuiditas, <i>leverage</i> dan aktivitas perusahaan tidak memiliki peran dalam pengungkapan <i>sustainability report</i> .
7.	Mega Putri Yustia Sari (2013)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Variabel komite audit dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan variabel likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas perusahaan, ukuran perusahaan dan dewan direksi tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> perusahaan.

8.	Azwir Nasir, Elfi Ilham, dan Vadela Irna Utara (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar	Variabel <i>Return on Asset</i> , <i>Debt to Equity Ratio</i> , dan <i>Governance Committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan ( <i>sustainability report</i> ), sedangkan <i>current ratio</i> , <i>inventory turnover</i> , <i>size</i> , komite audit, dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan ( <i>sustainability report</i> ).
9.	Abdul Azis (2014)	Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (Gcg) Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Di Indonesia Periode Tahun 2011-2012)	Variabel yang berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> hanya kepemilikan saham manajerial yaitu memiliki pengaruh positif signifikan. Sedangkan, variabel lainnya seperti ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham terkonsentrasi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh.
10	Fadhila Adhipradana (2014)	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Variabel-variabel total aset (TA), total karyawan (TK), dan <i>governance committee</i> (GC) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sementara profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), <i>dividend payout ratio</i> (DPR), komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen maupun kepemilikan asing bagi perusahaan tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
11.	Faizatul Hasanah, Heri Yanto, Bestari Dwi Handayani (2014)	Model Pengembangan <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sustainability Report</i> Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh negative terhadap profitabilitas, sementara komite audit dan <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap <i>leverage</i> dan <i>good corporate governance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh negative terhadap <i>good corporate governance</i> , sementara dewan direksi dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>good corporate governance</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

			dewan direksi dan komite audit. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>sustainability report</i> , sedangkan <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>sustainability report</i> .
--	--	--	--

Tabel 2.1 menunjukkan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainability report*. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Sari (2013), adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2010-2013, sedangkan penelitian terdahulu yaitu periode 2009-2011.
2. Perbedaan sumber pengambilan data, pada penelitian ini data diambil dari website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) serta website perusahaan sedangkan pada penelitian terdahulu data diambil melalui pusat *Bloomberg*.
3. Variabel kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini hanya profitabilitas dan leverage, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, leverage, aktivitas perusahaan, dan likuiditas. Penelitian ini tidak menggunakan aktivitas perusahaan dan likuiditas karena dari hasil penelitian terdahulu aktivitas perusahaan dan likuiditas konsisten tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
4. Pada penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah dewan komisaris independen dan komite audit, sedangkan penelitian terdahulu

menggunakan dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit. Dewan direksi tidak diteliti kembali karena menurut hasil penelitian Sari (2013) dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* sedangkan dewan komisaris independen dan komite audit dianggap lebih dominan dalam mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*.

5. Indikator variabel yang digunakan untuk mengukur komite audit dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung jumlah anggota komite audit, sedangkan pada penelitian terdahulu indikator yang digunakan adalah jumlah rapat. Indikator yang digunakan untuk menghitung pengungkapan *sustainability report* dalam penelitian ini yaitu berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI 3.1) yaitu total item yang diungkapkan adalah sebanyak 84 item.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan. Donovan dan Gibson (2000), menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial dan dengan demikian investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut

(Rusdianto, 2013:46). Sejalan dengan penelitian Donovan dan Gibson (2000), hasil penelitian Sari (2013), mendukung teori legitimasi tersebut dengan menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Adhipradana (2014) peningkatan profitabilitas perusahaan maka perusahaan memiliki dana yang lebih untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Hal ini berimbas pada semakin banyaknya informasi yang dapat diungkapkan dalam *sustainability report*. *Sustainability report* merupakan salah satu jenis pengungkapan informasi yang bersifat sukarela (*voluntary*). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin menunjukkan kepada *public* bahwa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain dengan industri yang sama. Melalui pengungkapan *sustainability report*, perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, masyarakat dan lingkungan.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian Sari (2013), seperti penelitian Nasir, Ilham dan Utara (2014) serta penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) yang membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Menurut Suryono dan Prastiwi (2011), perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena

perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan melalui *sustainability report*, karena profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang harus diungkapkan dalam *sustainability report*.

Pengungkapan *sustainability report* ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepada *stakeholder* untuk mempertahankan dukungan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Selain itu pengungkapan *sustainability report* juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan para *stakeholder*, yang ingin memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit dihasilkan perusahaan. Informasi ini terutama penting bagi *stakeholder* selain investor dan kreditor yang biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi atau *financial*.

### **2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

*Leverage* adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membiayai perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan (Makmun, 2002). Rasio digunakan untuk memberikan gambaran tentang struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat risiko tak tertagihnya suatu hutang. Menurut Jensen (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage maka semakin tinggi risiko perusahaan dan mengalami *financial distress*. Hal ini akan berpengaruh

pada nilai perusahaan, sehingga mengurangi kemakmuran pemilik (Safitri, 2013:23) dalam Rusdianto (2013:45).

Menurut Anggraini (2008) dalam Aulia (2013) berdasarkan teori agensi, diperlukan tambahan informasi untuk mengurangi ataupun menghilangkan keraguan pemegang saham terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-hak para pemegang saham. Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan menanggung biaya pengawasan yang tinggi sehingga akan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, leverage perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sari (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menanggung *monitoring cost* yang juga tinggi. Menurut Suryono dan Prastiwi (2011), perusahaan akan cenderung untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam proses pengumpulan dan pengelolaan informasi dalam rangka penciptaan laporan, sehingga perusahaan akan memilih untuk mengurangi tingkat pengungkapan laporan terutama yang bersifat sukarela seperti *Sustainability Report*.

Menurut Widiyanto (2010) semakin tinggi tingkat leverage, maka ada kecenderungan perusahaan berusaha untuk melaporkan profitabilitasnya agar tetap tinggi. Hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat sehingga dapat meyakinkan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dari para *stakeholder*-nya. Perusahaan yang memiliki

tingkat leverage yang tinggi, menganggap perlu memberikan laporan tanggung jawab sosial, sehingga ada “*good news*” tentang kinerja perusahaan, sehingga dapat menarik para *stakeholder* untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dapat dilakukan perusahaan salah satunya melalui pembuatan *sustainability report*.

Hasil penelitian dari Ratnasari (2011) menemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability*. Tingkat *leverage* yang tinggi pada perusahaan juga meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Pelaporan laba yang lebih tinggi akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang kuat sehingga meyakinkan perusahaan dalam memperoleh jaminan dari para *stakeholder*-nya. Perusahaan dalam menggapai laba yang tinggi maka akan mengurangi biaya-biaya, termasuk mengurangi biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial. Perusahaan dalam mempublikasikan *sustainability report* memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang cukup besar sehingga perusahaan akan mengurangi tingkat pengungkapan laporan yang bersifat sukarela terlebih terpisah dari *annual report*.

### **2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Menurut Fery dan Jones dalam Widiyanto (2011) mengatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Salah satu upaya yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai *sustainable growth* adalah dengan melalui pembuatan *sustainability report*. *Sustainability report* digunakan perusahaan untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan praktik sosial lingkungan. Pengungkapan laporan ini juga termasuk bagaimana praktik CSR yang telah dirancang dan direalisasi oleh manajer.

Semakin besar suatu perusahaan akan memunculkan pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Menurut Cowen dalam Widiyanto (2011) mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan memiliki pengaruh dan aktivitas yang lebih banyak terhadap masyarakat, sehingga akan membuat para pemegang sahamnya untuk lebih memperhatikan laporan-laporan perusahaan dalam menyebarkan informasi aktivitas-aktivitas sosial yang telah diimplementasikan.

Menurut Ariestyowati (2009) dalam Aulia (2013) menyebutkan terdapat 4 argumen yang menjelaskan mengapa perusahaan yang lebih besar memungkinkan

untuk melakukan pengungkapan informasi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil yaitu:

- Perusahaan yang lebih besar dimungkinkan mempunyai biaya produksi informasi atau biaya kerugian persaingan yang lebih rendah dari perusahaan yang lebih kecil.
- Perusahaan besar dimungkinkan mempunyai dasar pemilikan yang lebih luas, sehingga diperlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan dari pemegang saham.
- Perusahaan lebih besar memungkinkan untuk merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi, yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan yang canggih.
- Manajer perusahaan yang lebih kecil tampaknya percaya bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan dapat membahayakan potensi kompetitif perusahaan.

Penelitian dari Aulia (2013) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Penelitian Idah (2013) dan penelitian Adhipradana (2014) juga berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Idah dan Adhipradana menggunakan logaritma natural total aset sebagai pengukuran ukuran perusahaan. Total aset adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis atau usaha. Semakin besar total aset perusahaan maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan perusahaan besar. Total aset perusahaan yang meningkat berarti kekayaan perusahaan meningkat. Dengan total aset yang besar, perusahaan memiliki daya yang lebih besar untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Pengungkapan informasi sosial pada *sustainability report* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Perusahaan dengan total aset yang meningkat menunjukkan bahwa kekayaan perusahaan meningkat, sehingga dapat lebih banyak kontribusi pada kegiatan sosial untuk mendapatkan legitimasi publik. Dengan semakin banyak kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang dapat digunakan dalam *sustainability report*.

#### **2.2.4 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan

dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Menurut Mulyadi (2002) dalam Sari (2013), dewan komisaris independen bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Pengendalian intern yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan, maka dari itu perusahaan akan mengungkapkan informasi seluas-luasnya termasuk informasi tambahan seperti *sustainability report*.

Menurut Prasajo (2011 dalam Putri (2013), semakin besar perentase komisaris independen maka akan meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kualitas pengungkapan dan mengurangi usaha menutupi informasi perusahaan. Tricker (1984) dan Hanifa dan Cooke (2005) dalam Ratnasari (2011) menyatakan bahwa direktur independen berusaha mempublikasikan aktivitas perusahaan dan memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan laporan *sustainability* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan organisasi, tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan.

Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985) dalam Azis (2014), menemukan bahwa dengan adanya Dewan Komisaris Independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah Komisaris Independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada Dewan Komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002) dalam

Azis (2014). Dengan demikian, semakin besar komposisi Independensi Dewan Komisaris, maka kemampuan Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi seluruh pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. Dengan kata lain, semakin besar komposisi Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat bertindak semakin objektif dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian hal ini mendorong kualitas pengungkapan *Sustainability Report* secara lebih luas.

Hasil penelitian Sari (2013) dapat membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini sesuai dengan Hanifa dan Cooke (2002) yang menyatakan apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan, hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Peningkatan kualitas pengungkapan dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara mengungkapkan laporan tambahan seperti *sustainability report*. Jika citra perusahaan meningkat, maka hal tersebut menandakan pengawasan yang baik dari dewan komisaris independen dan kerja manajemen yang efektif.

### **2.2.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang termuat dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa Komite Audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari tiga orang, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya berasal

dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Collier (1993) dalam Nasir dan Abdulllah (2004) menyatakan bahwa keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan ukuran komite audit yang semakin besar, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas (Waryanto, 2010) dalam Azis (2014).

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan (Foker, 1992 ) dalam Said et. al, (2009). Menurut Ho dan Wong (2001) dalam Ratnasari (2011) menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan yang lengkap dan berintegritas tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh McCullen dan Raghunandan dalam Sari (2013) menyatakan bahwa keberadaan audit mampu

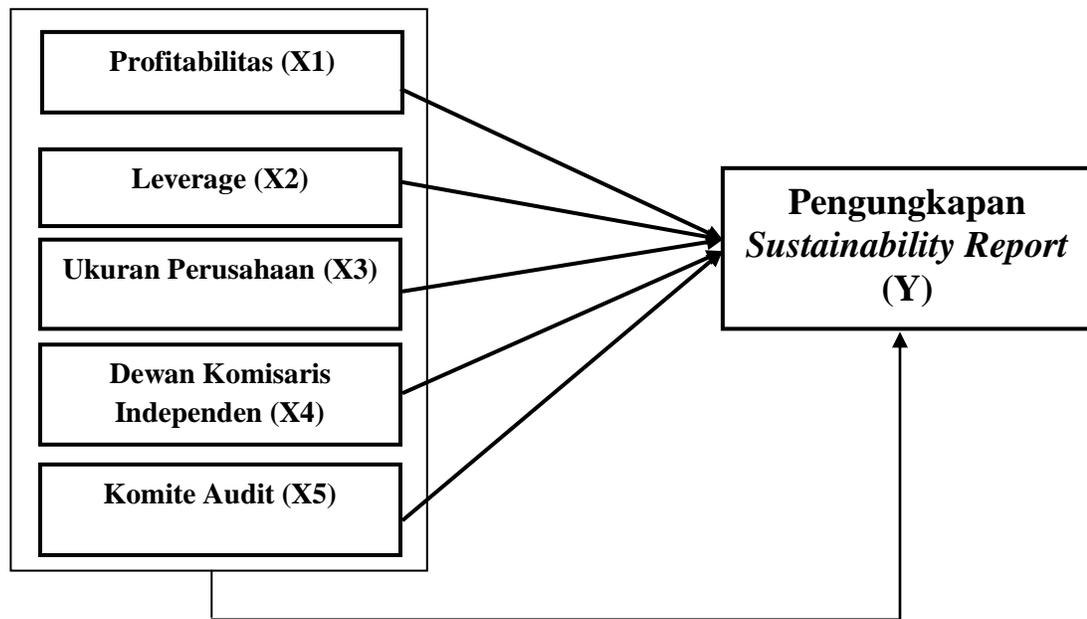
menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. Laporan yang lengkap terdiri dari laporan *mandatory* dan *voluntary*. Selain laporan keuangan, manajer akan menerbitkan laporan sukarela seperti *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Collier (dalam Waryanto, 2010), menyatakan bahwa keberadaan komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian Collier dan Gregory (1999) dalam Putri (2014), kehadiran dari komite audit akan meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan. Komite audit dapat meminta direksi dan manajemen untuk memberikan informasi atas laporan keuangan lebih transparan dan mendorong untuk mengungkapkan informasi-informasi yang bersifat sukarela (Barros et al., 2013). Menurut Djuitaningsih & Marsyah (2012) dalam Risty dan Sany (2015), besarnya komite audit dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* karena semakin besar komite audit, pengawasan yang dilakukan akan semakin maksimal.

Hasil penelitian Hasanah *et.al* membuktikan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin berkualitas komite audit, maka mereka akan semakin dapat memahami makna strategis dari pengungkapan informasi dan apa yang dibutuhkan stakeholder secara luas. Oleh karena itu, komite audit dibentuk untuk membantu manajemen dalam mempublikasikan *sustainability report* yang sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Menurut Adhipradana (2014)

pengungkapan informasi sosial pada *sustainability report* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi masyarakat.

Untuk memperoleh hasil empiris lebih jauh mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian “Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* antara lain:

**Hipotesis 1** = Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*

**Hipotesis 2** = Terdapat pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*

**Hipotesis 3** = Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*

**Hipotesis 4** = Terdapat pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*

**Hipotesis 5** = Terdapat pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*

**Hipotesis 6** = Terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*